

STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DEWAN KOPERASI INDONESIA

FINANCIAL REPORTING STANDARDS OF INDONESIA CO-OPERATIVE COUNCIL

Oleh : Bambang Widarno dan Dewi Saptantinah PA.

Abstract

Dekopin is a single compartment of the cooperative movement in Indonesia in charge of fighting for the ideals of the cooperative movement, channeling the aspirations of members, and the government's role as a partner in the development of cooperatives. Programs that run includes areas : organizational and institutional; advocacy and socialization; education, training and counseling; business development; research and consultancy; cooperation and regional relations. Presentation of the financial statements as a form of transparency and accountability aims to provide information that can be used to evaluate the performance of leaders and organizations as well as improve the quality of management. Good report is a report that is easily understood by users, especially members and the government as a major contributor in Dekopin operations.

This research is a kind of basic research. Technique of data collection is done by documentation, literature, and interviews. Data analysis techniques by applying standard procedures (due process) in the preparation of accounting standards. The main reference in the preparation of this standard is SFAS No.45.

The results of the study in the form of a draft standard Dekopin financial statements. The draft is expected to improve the quality of financial statements, has the power of appeal, more easily understood, as well as provide a clearer picture of the actual condition of Dekopin. Systematics draft adjusted to the statement of financial accounting standards. Elements of financial statements are composed Dekopin include statements of financial position, statements of activities and notes of the financial statements. The draft is still to be proposed to the Governing Dekopin in the region and the center for review and consultation with the IAI before it was decided and set as the standard financial statements that must be applied by Dekopin throughout Indonesia. This draft can already be implemented as a step test to determine deficiencies that may soon be revised. For academics can be used as a theme interesting discussion.

Keywords : *Indonesia Co-operative Council, SFAS No. 45, Statement of financial position, Statements of activity.*

ABSTRAK

DEKOPIN adalah wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia yang bertugas memperjuangkan cita-cita gerakan koperasi, menyalurkan aspirasi anggota, dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Program yang dijalankan meliputi bidang: organisasi dan kelembagaan; advokasi dan sosialisasi; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; pengembangan usaha; penelitian dan konsultasi; kerjasama dan hubungan daerah. Penyajian laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bertujuan memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja pimpinan dan organisasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian

dasar namun mengambil obyek di DEKOPINDA Kota Surakarta. Data yang diambil adalah laporan keuangan tahun 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Teknik analisis data dengan menerapkan prosedur baku (*due process*) dalam penyusunan standar akuntansi. Acuan utama dalam penyusunan standar ini adalah PSAK No. 45.

Hasil penelitian berupa draf standar laporan keuangan DEKOPIN. Draft ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, memiliki daya banding, lebih mudah dipahami, serta lebih memberikan gambaran tentang kondisi DEKOPIN yang sebenarnya. Sistematika draf disesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Elemen laporan keuangan DEKOPIN yang tersusun meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Draft tersebut masih harus diusulkan ke Pimpinan DEKOPIN di wilayah dan pusat untuk dikaji dan dikonsultasikan dengan IAI sebelum diputuskan dan ditetapkan sebagai standar laporan keuangan yang harus diterapkan oleh DEKOPIN seluruh Indonesia. Draft ini sudah dapat diterapkan oleh DEKOPINDA Kota Surakarta sebagai langkah ujicoba untuk mengetahui kekurangan sehingga segera dapat dilakukan revisi. Bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai tema diskusi yang menarik. Lingkupnya dapat berkembang tidak sebatas DEKOPIN saja namun untuk organisasi nirlaba di bidang lain seperti keagamaan, pendidikan, olahraga, politik, sosial yang saat ini cukup pesat perkembangannya.

Kata kunci : Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), PSAK No. 45, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas.

PENDAHULUAN

Pembinaan koperasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). DEKOPIN merupakan wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. DEKOPIN sebagai lembaga gerakan koperasi yang otonom, bertugas memperjuangkan cita-cita gerakan koperasi Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota, menjadi wakil gerakan koperasi di dalam dan di luar negeri, serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Untuk itu, DEKOPIN berkewajiban untuk membangun akses yang seluas-luasnya dengan seluruh *stakeholder* koperasi. Kegiatan DEKOPIN sesuai Anggaran Dasarnya meliputi bidang: organisasi dan kelembagaan; advokasi dan sosialisasi; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; pengembangan usaha dan permodalan; penelitian, pengembangan dan konsultasi; pemuda, wanita, kerjasama dan hubungan dalam dan luar negeri.

Menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga-lembaga publik, mendorong diciptakannya sistem pelaporan yang lebih baik. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Penyajian laporan keuangan menurut Mardiasmo (2009: 14) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: 1) kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, 2) kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan, 3) jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, 4) bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 5) posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, 6) perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan yang baik adalah laporan yang mudah dipahami oleh semua pihak dan memiliki daya banding. Standar pelaporan keuangan Dekopin dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Dekopin seluruh Indonesia yang hingga saat ini belum ada.

ORGANISASI NIRLABA

Menurut Bernardine R. Wirjana (2005), pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Dalam konteks pembangunan organisasi nirlaba yang unggul, berkelanjutan dan memberikan energi perubahan dan pembaruan bagi masyarakat.

Ciri-Ciri Organisasi Nirlaba menurut Mohamad Mahsun (2011: 201) meliputi:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. (PSAK, 2012: 45.1).

LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama

informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dalam PSAK No. 45 meliputi: laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

DUE PROCESS PENYUSUNAN STANDAR

Proses penyiapan (*due process*) suatu Standar Akuntansi (SA) merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi (PSA). Proses penyiapan SA yang digunakan adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia (DEKOPIN). Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan Standar Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan menjadi Standar
2. Pembentukan Kelompok Kerja
3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
4. Penulisan Draf Standar Akuntansi oleh Kelompok Kerja
5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja (Pimpinan Dekopin)
6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif (IAI) untuk Pengambilan

keputusan peluncuran draf publikasian Standar Akuntansi.

7. Peluncuran Draf publikasian Standar Akuntansi (*Exposure Draft*)
8. Dengar Pendapat Terbatas (*Limited Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)
9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf publikasian
10. Finalisasi Standar Dalam rangka finalisasi draf SA
11. Sosialisasi Awal Standar

STANDAR LAPORAN KEUANGAN DEKOPIN

1. Pendahuluan

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, seperti halnya DEKOPIN, tidak ada kepemilikan.

DEKOPIN berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi. Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja DEKOPIN diatur dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah. DEKOPIN menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

(1) memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi,(2) melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi, (3) meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat,(4) menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi, (5) mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, (6) mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi, (7) menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian, dan (8) memajukan organisasi anggotanya.

Para pengguna laporan keuangan DEKOPIN memiliki kepentingan bersama yaitu untuk menilai: (1) jasa yang diberikan oleh DEKOPIN dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan (2) cara pimpinan melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja pimpinan. Kemampuan DEKOPIN untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan. Pertanggungjawaban pimpinan mengenai kemampuannya mengelola sumber daya DEKOPIN yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas.

a. Tujuan

Standar ini bertujuan mengatur pelaporan keuangan DEKOPIN. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan DEKOPIN dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya bading yang tinggi.

b. Ruang Lingkup

Standar ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh DEKOPIN yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sumber daya DEKOPIN berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan,
- 2) Melakukan kegiatan tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau terdapat sisa lebih dari suatu kegiatan, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada anggota DEKOPIN,
- 3) Tidak ada kepemilikan, kepemilikan dalam DEKOPIN tidak dapat dijual, dialihkan atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya DEKOPIN pada saat dibubarkan.

Standar ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan DEKOPIN. Hal-hal yang tidak diatur dalam standar akuntansi ini harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku umum.

c. Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam standar ini: **Sumbangan** adalah sebuah pemberian secara sukarela oleh perorangan atau badan hukum, dengan tanpa adanya balas jasa secara langsung dalam rangka pengembangan dan pendanaan DEKOPIN. Istilah lain yang disamakan dengan sumbangan dalam standar ini adalah hibah dan kontribusi.

Iuran adalah urunan, pungutan sejumlah uang yang harus dibayar secara rutin oleh setiap anggota ke DEKOPIN. Jenis iuran yang dibayar anggota yaitu iuran rutin dan iuran dana pendidikan.

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi DEKOPIN diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomis lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan samapai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Pendapatan sumbangan yang terikat penggunaannya adalah yang digunakan untuk pengeluaran investasi dan pencatatannya harus dikapitalisasi.

Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Umumnya pendapatan sumbangan yang tidak terikat, digunakan untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran operasional DEKOPIN, dan pencatatannya langsung dibebankan pada tahun berjalan.

2. Penjelasan

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota DEKOPIN, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan

sumber daya bagi DEKOPIN. Pihak pengguna laporan keuangan DEKOPIN memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: 1) Jasa yang diberikan oleh DEKOPIN dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan 2) Cara pimpinan DEKOPIN melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja pimpinan.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi;
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih;
- 3) Jenis dan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
- 4) Usaha jasa suatu organisasi.

b. Laporan Keuangan DEKOPIN

Laporan keuangan DEKOPIN meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan dan laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan

c. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsure-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan

keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota DEKOPIN, kreditur dan pihak lain untuk menilai:

- 1) Kemampuan DEKOPIN untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
- 2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Pengelompokan dalam aktiva dan kewajiban dilakukan atas dasar yang memiliki karakteristik yang serupa/homogen, seperti:

- 1) Kas dan setara kas (bank),
- 2) Investasi jangka pendek,
- 3) Piutang anggota dan penerima jasa yang lain,
- 4) Persediaan,
- 5) Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar dimuka,
- 6) Investasi jangka panjang,
- 7) Tanah, gedung, inventaris, kendaraan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan.
- 8) Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang dikelola oleh DEKOPIN akan tetapi terikat penggunaannya, seperti tanah dan bangunan yang berasal dari sumbangan Pemerintah, DEKOPIN hanya memiliki hak pakai bukan hak menjual.

Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas,

dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh temponya,

- 2) Mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang,
- 3) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Dalam standar ini klasifikasi aktiva bersih yang dimaksud meliputi sumbangan/iuran, sumbangan/iuran yang telah digunakan, dan cadangan. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari aktiva bersih tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada

aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Pendapatan atau surplus akan menambah aktiva bersih, serta beban dan defisit akan mengurangi aktiva bersih.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Surplus, dan Defisit

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan surplus dan defisit dari hasil kegiatan pelaksanaan program sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, surplus dan defisit dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau

tidak berulang, atau dengan cara lain.

Informasi Pendapatan dan Beban

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi incidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan aktiva tetap yang tidak digunakan lagi.

Informasi Pemberian Jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, anggota dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, DEKOPIN dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya berdasarkan gaji, ATK, listrik, penyusutan, dan lain-lain.

Program kegiatan DEKOPIN baik yang utama maupun pendukung, bermanfaat bagi anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi DEKOPIN. Program utama DEKOPIN meliputi bidang: (1)

organisasi dan pengembangan SDM, seperti pendidikan dan pelatihan, pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota (iuran rutin dan iuran pendidikan), (2) advokasi dan fasilitasi, seperti sosialisasi, temu usaha dan jaringan usaha koperasi (JUK), fasilitasi permodalan, dan (3) pemberdayaan perempuan, pemuda, dan hubungan daerah. Aktivitas pendukung umumnya meliputi aktivitas manajemen, rapat-rapat, perjalanan dinas, kesekretariatan, rumah tangga, pembenahan sarana dan prasarana, pemenuhan kewajiban kepada negara, dan lain-lain

3. Lampiran

Laporan keuangan DEKOPIN meliputi laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas. Khusus laporan aktivitas terdapat dua alternatif pelaporan yaitu (1) dengan saldo awal kas/bank dan (2) tanpa saldo awal kas/bank. Pada alternatif 1 saldo akhir kas/bank akan langsung diketahui dan nilainya harus sama dengan saldo kas/bank di laporan posisi keuangan. Sedangkan pada alternatif 2 saldo kas/bank tidak tampak namun bisa langsung diketahui surplus atau defisit aktiva bersih DEKOPIN pada tahun berjalan.

a. Format Laporan Posisi Keuangan

**DEKOPINDA KOTA SURAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 20X0 DAN 20X1**

AKTIVA	20X0	20X1	KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH	20X0	20X1
Aktiva Lancar			Kewajiban Jk Pendek		
Kas dan setara kas	XXX	XXX	Hutang Anggota	XXX	XXX
Investasi Jk Pendek	XXX	XXX	Biaya ymh Dibayar	XXX	XXX
Piutang	XXX	XXX	Subtotal	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX			
Biaya dibayar Dimuka	XXX	XXX	Kewajiban Jk Panjang		
Subtotal			Hutang Pihak III	XXX	XXX
			Subtotal	XXX	XXX
Aktiva Tidak Lancar			Aktiva Bersih		
Aktiva Tetap Bersih	XXX	XXX	Sumbangan/Iuran	XXX	XXX
Investasi Jk Panjang	XXX	XXX	Sumbangan/Iuran yang		
Subtotal	XXX	XXX	Digunakan	XXX	XXX
			Cadangan	XXX	XXX
Aktiva Lain-lain	XXX	XXX	Subtotal	XXX	XXX
TOTAL	XXX	XXX	TOTAL	XXX	XXX

b. Format Laporan Aktivitas

Alternatif 1

**DEKOPINDA KOTA SURAKARTA
LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 20X0 DAN 20X1**

URAIAN	20X0	20X1
Pendapatan		
Saldo awal	XXX	XXX
Iuran Anggota	XXX	XXX
Iuran Pendidikan	XXX	XXX
Bantuan APBN/APBD	XXX	XXX
Kontribusi Anggota	XXX	XXX
Pendapatan Investasi	XXX	XXX
Sumbangan/Pendapatan Lain-lain yang Sah	XXX	XXX
Jumlah Pendapatan	XXX	XXX
Beban		
Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM	XXX	XXX
Bidang Advokasi dan Fasilitasi	XXX	XXX
Bidang Perempuan, Pemuda dan Hub. Daerah	XXX	XXX
Rapat Kerja/Musyawarah Kerja	XXX	XXX
Transport Pimpinan dan SPPD	XXX	XXX
Gaji dan Tunjangan Karyawan	XXX	XXX
Rapat Koordinasi	XXX	XXX
Telepon, Listrik dan Air	XXX	XXX
Peringatan Hari Koperasi	XXX	XXX
Sarana dan Prasarana	XXX	XXX
Kewajiban DEKOPIN	XXX	XXX
Kewajiban kepada Negara	XXX	XXX
Administrasi dan Umum	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Pengeluaran	XXX	XXX
Saldo Akhir	XXX	XXX

Alternatif 2

**DEKOPINDA KOTA SURAKARTA
LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 20X0 DAN 20X1**

URAIAN	20X0	20X1
Pendapatan		
Iuran Anggota	XXX	XXX
Iuran Pendidikan	XXX	XXX
Bantuan APBN/APBD	XXX	XXX
Kontribusi Anggota	XXX	XXX
Pendapatan Investasi	XXX	XXX
Sumbangan/Pendapatan Lain-lain yang Sah	XXX	XXX
Jumlah Pendapatan	XXX	XXX
Beban		
Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM	XXX	XXX
Bidang Advokasi dan Fasilitasi	XXX	XXX
Bidang Perempuan, Pemuda dan Hub. Daerah	XXX	XXX
Rapat Kerja/Musyawarah Kerja	XXX	XXX
Transport Pimpinan dan SPPD	XXX	XXX
Gaji dan Tunjangan Karyawan	XXX	XXX
Rapat Koordinasi	XXX	XXX
Telepon, Listrik dan Air	XXX	XXX
Peringatan Hari Koperasi	XXX	XXX
Sarana dan Prasarana	XXX	XXX
Kewajiban DEKOPIN	XXX	XXX
Kewajiban kepada Negara	XXX	XXX
Administrasi dan Umum	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Pengeluaran	XXX	XXX
Surplus (Defisit) Aktiva Bersih	XXX	XXX

KESIMPULAN

Laporan keuangan Dekopin dengan mendasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan draf standar laporan keuangan Dekopin dilakukan penyesuaian antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Dengan tersusunnya standar laporan keuangan Dekopin tentu akan ada keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat lebih memiliki daya banding dan cara pengukuran kinerja yang sama dan lebih akurat serta pengelolaan Dekopin yang lebih baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 2013, Jakarta.
- Bernardine R. Wirjana, 2005, http://book.store.co.id/Mencapai_Ke_mandirian_dalam_Pendanaan_Organisasi_buku_2717.html
- Ibnoe Soedjono, 2004, *Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-nilai Dalam Koperasi*, Jakarta: LSP2I.
- International Co-operative Alliance, 2009, *Jatidiri Koperasi: ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21*, Terjemahan-Pengantar Ibnoe Soedjono, Jakarta: LSP2I.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, 1999, *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting*
- Gilbert, N. and H. Specht, 1977, *Planning for Social Welfare; Issues, Model, and Tasks*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc..
- Mardiasmo, 2006, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 - 17
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset
- Mohamad Mahsun, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ruppel, W. 2007. *Not-for-profit Accounting Made Easy*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Standar Akuntansi Keuangan, 2012, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2013, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Suwandi, 2005. Revitalisasi Koperasi Sekunder Nasional. *Jurnal Pengkajian Koperasi UKM*, No: 26 Tahun XX 2005, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.